

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN JURNAL

- Akhmadi, M. H. (2017). Determinan Keberhasilan E-Filing Pajak di Indonesia: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua. *Jurnal Pajak Indonesia*.
- Anggadhika Widya Pramana Putra, T. G. (2021). Pengaruh Penagihan Pajak dan Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 116-141.
- Angraini, S. (2019). *Pengaruh Kewajiban Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Jakarta Jatinegara*. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Ardetrian Arief, M. G. (2019). *elibrary unikom*. Diambil kembali dari elibrary UNIKOM:https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1077/8/UNIKOM_M.Gilang%20Ardetrian_13.Bab%202.pdf
- ILMA, A. M. (2020). *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Tagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Iman, F. (2017). *REPOSITORY INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA*. Diambil kembali dari repo darmajaya: <http://repo.darmajaya.ac.id/881/3/BAB%20II.pdf>

- Istiyah, R. N., Pratiwi, R. N., & Pani, S. (2014). Efektivitas Penyitaan Harta Kekayaan Milik Wajib Pajak Badan Dalam Rangka Mengurangi Tunggakan Wajib Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). *Jurusan Administrasi Publik*, 452-457.
- Lestari, M. S. (2020). *Tinjauan Tata Cara Penyitaan Terhadap Wajib Pajak Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor*. Bogor: Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.
- Manurung, S. M. (2021). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pemerimaan Pajak di Kota Batam*. Batam: Universitas Putera Batam.
- Mardani, R. (2021, October 3). *Jurnal Solusi Bisnis Anda*. Diambil kembali dari M Jurnal: <https://mjurnal.com/skripsi/hipotesis-penelitian/>
- Oktaviani, N. (2019). *elibrary unikom*. Diambil kembali dari elibrary unikom: https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/2292/13/UNIKOM_NOVIA%20OKTAVIANI_17.ARTIKEL.pdf
- Prilly, S. (2019). *eprints*. Diambil kembali dari eprints polsri: http://eprints.polsri.ac.id/2996/3/BAB%20II_fIX.pdf
- Reski, R. (2015, March 19). *Teori Agenda Setting, Uses and Gratification, Kultivasi*. Diambil kembali dari Blog Mahasiswa Universitas Brawijaya: <http://blog.ub.ac.id/reinardusreski/2015/03/19/teori-agenda-setting-uses-and-gratification-kultivasi/>
- Siahaan, M. P. (2010). *Hukum Pajak Material*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Siti Khodijah, M. L., Ladewi, Y., & Yamaly, F. (2021). Pengaruh Pelaksanaan Penagihan Pajak Terhadap Pencairan Tunggalan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 96-97.

Tanjung, A. S. (2020). *Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara*. Diambil kembali dari Repositori USU: <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/27949/172600067.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Waluyo. (2002). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.

Zuraida, I. (2010). *Penagihan dan Sengketa Pajak*. Jakarta: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

INTERNET

Candra Asmarani, N. G. (2021, April 28). *Apa Itu Penyitaan?* Diambil kembali dari DDTC: https://news.ddtc.co.id/apa-itu-penyitaan-29502?page_y=0

Positive, I. (t.thn.). *Pengertian Teori Atribusi (Attribution Theory)*. Diambil kembali dari Indo positive: <https://www.indopositive.org/2020/09/pengertian-teori-atribusi-attribution.html>

Wikipedia. (2019, June 4). *Kepatuhan*. Diambil kembali dari Wikipedia: <https://id.wikipedia.org/wiki/Kepatuhan>

wikipedia. (2021, March 10). *Etika Deontologis*. Diambil kembali dari Wikipedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Etika_deontologis

Wikipedia. (2021, May 11). *Teori Harapan*. Diambil kembali dari Wikipedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_harapan

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAIN

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak